

**TINDAKAN HM SELAKU DIREKTUR CV. SBG YANG MELAKUKAN
EKSPLOITASI DAN PENJUALAN HASIL HUTAN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN**

Nama : Putri Retno Ima Kurnia
Jurusan/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum
Pembimbing : 1. Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M. Hum.
2. Anton Hendrik Samudra, S.H., M.H.

ABSTRAK

Abstrak –Tujuan Penulisan jurnal ilmiah ini adalah sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan Praktis dari penulisan skripsi ini untuk dapat mengetahui Apakah HM selaku Direktur CV. SBG yang melakukan eksploitasi dan penjualan hasil hutan dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Tindakan HM melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf g jo Pasal 78 ayat (6) dan Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) HM selaku Direktur CV. SBG yang melakukan penambangan tanpa izin dan melakukan pengangkutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keretangan sahnya hasil hutan. CV. SBG adalah subyek hukum berupa badan usaha maka unsur setiap orang terpenuhi. Melakukan eksploitasi bahan galian di dalam kawasan Hutan Produksi KM-21 yang merupakan WIUP PT. STI. Sehingga unsur melakukan eksploitasi bahan galian di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri terpenuhi. Kemudian HM selaku Direktur CV. SBG melakukan kegiatan loading batubara menggunakan 6 (enam) tongkang pengangkut yang ditarik Toug Boat dari Pelabuhan Jetty Luwe melewati DAS Barito menuju Desa Muara Rimpung Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) tongkang mengangkut hasil hutan berupa bahan galian tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Maka unsur melakukan pengangkutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan terpenuhi. HM selaku Direktur CV. SBG melanggar dua ketentuan Undang-Undang yaitu Pasal 50 ayat (3) huruf g jo Pasal 78 ayat (6) UU Kehutanan dan Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UU Kehutanan. Oleh karena HM melanggar dua ketentuan perundang-undangan, maka perbuatan HM dapat di golongkan sebagai konkursus. Konkursus yang paling cocok dengan perbuatan HM adalah konkursus realis dengan stelsel pemidanaan kumulatif terbatas. HM melakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran, bukan karena adanya daya paksaan, pembelaan terpaksa, sehingga tidak ada alasan pemaaf. Hal ini berarti HM dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Kata Kunci: Eksploitasi, Pengangkutan, Pertambangan

HM'S ACTION AS THE DIRECTOR OF CV. SBG WHO EXPLOIT AND SELL FOREST PRODUCTS IN TERMS OF LAW NUMBER 41 OF 1999 CONCERNING FORESTRY

Name : Putri Retno Ima Kurnia
Major/Study Programme : Law/Legal Studies
Contributor : 1. Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M. Hum.
2. Anton Hendrik Samudra, S.H., M.H.

ABSTRACT

Abstract - The practical purpose of writing this journal is to find out whether HM as the Director of CV. SBGs that exploit and sell forest products can be subject to criminal liability in view of Law No. 41 of 1999 concerning Forestry. The conclusions are as follows: HM's action violates Article 50 paragraph (3) letter g jo Article 78 paragraph (6) and Article 50 paragraph (3) letter h jo Article 78 paragraph (7) HM as Director of CV. SBGs that carry out mining without permission and do carriage which is not equipped with a letter of legitimacy of legal forest products. The CV. SBG is a legal subject in the form of a business entity, so that the elements of each person have been fulfilled. By doing exploit excavated material in the KM-21 Production Forest area which is the PT STI's minning permit area (WIUP). So that the element of exploiting excavated materials in forest areas without the Minister's permission is fulfilled. Then, HM as the director of CV. SBG carried out coal loading by using 6 (six) Toug Boat hauled barges from Jetty Luwe Port through the Barito watershed to Muara Rimpung Village, Sub-district Dusun Selatan, District Barito Selatan, and after the inspection of 6 (six) barges carrying mineral products in the form of minerals without being equipped with a certificate of legitimate forest products simultaneously. Furthermore, the element of carrying out carriage which is not completed a certificate of legality of forest products is fulfilled. HM as Director of CV. SBG violates two provisions of Law namely Article 50 paragraph (3) letter g jo Article 78 paragraph (6) Forestry Law and Article 50 paragraph (3) letter h jo Article 78 paragraph (7) Forestry Law. From that, HM violates two statutory provisions, HM's actions can be classified as concursus. In this case, the best concursus of HM's actions are realist concursus with limited cumulative punishments system. HM carries out intentionally and consciously, not because of the power of coercion, forced defens, so there is no reason forgiving. It means that HM can be sought for criminal responsibility.

Keywords: exploitation, carriage , mining